

Transformasi Ketahanan Multitingkat Sebagai Benteng Ideologi Bagi Remaja Dari Siber-Radikalisasi di Indonesia

Yosua Cahyo Pratomo¹, Sri Murtiana¹

¹Universitas Pertahanan, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author e-mail: yosuapratomo87@gmail.com

Article History: Received on 7 July 2026, Revised on 9 July 2026,
Published on 8 August 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola eksploitasi remaja dalam fenomena siber-radikalisasi di Indonesia serta merumuskan kerangka Transformasi Ketahanan Multitingkat sebagai benteng ideologi yang adaptif terhadap ancaman kontemporer. Menggunakan metode studi pustaka naratif dan analisis kebijakan kualitatif, penelitian ini mengkaji literatur serta regulasi pasca-restrukturisasi kelembagaan 2024 untuk membangun model pertahanan yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan psikososial remaja (Identity vs. Role Confusion) dieksploitasi melalui pola online grooming, seperti love bombing dan pemanfaatan isu global sebagai pemicu, yang berujung pada loyalitas terbelah dan risiko trauma berkepanjangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi sekaligus psikologi perkembangan, ketahanan komunitas, dan arsitektur kebijakan nasional dalam satu kerangka multitingkat yang spesifik untuk konteks Indonesia. Kerangka tersebut terdiri dari: (1) Ketahanan Diri melalui literasi digital kritis dan resiliensi empatik; (2) Ketahanan Komunitas dengan pemberdayaan perempuan sebagai agen deteksi dini dan optimalisasi tokoh agama daring; serta (3) Ketahanan Nasional yang mensinergikan kebijakan BNPT, Komdigi, Kemendikdasmen, dan Kemendiktisaintek. Implikasi praktisnya adalah tersedianya peta jalan implementatif bagi kementerian terkait, sementara kontribusinya memperkaya literatur tentang digital resilience dan kerentanan remaja di Asia Tenggara, sekaligus menawarkan pendekatan trauma-informed bagi program re-entry korban radikalisasi.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Kerentanan Remaja, Resiliensi Multitingkat, Siber-Radikalisasi

Abstract: This study aims to analyze the patterns of youth exploitation in the cyber-radicalization phenomenon in Indonesia and formulate a Multi-Level Resilience Transformation framework as an adaptive ideological bulwark against contemporary threats. Using narrative literature and qualitative policy analysis methods, this study examines literature and regulations post-2024 institutional restructuring to build an integrated defense model. The results show that adolescent psychosocial vulnerability (Identity vs. Role Confusion) is exploited through online grooming patterns, such as love bombing and the use of global issues as triggers, which leads to divided loyalties and the risk of prolonged trauma.

The novelty of this study lies in the integration of three dimensions simultaneously: developmental psychology, community resilience, and national policy architecture within a multi-level framework specific to the Indonesian context. The framework consists of: (1) Self-Resilience through critical digital literacy and empathetic resilience; (2) Community Resilience with the empowerment of women as early detection agents and optimization of online religious figures; and (3) National Resilience that synergizes the policies of the National Counterterrorism Agency (BNPT), Komdigi, the Ministry of Elementary and Secondary Education, and the Ministry of Education and Science and Technology. The practical implications include the availability of an implementation roadmap for relevant ministries, while the academic contribution enriches the literature on digital resilience and youth vulnerability in Southeast Asia, while also offering a trauma-informed approach to re-entry programs for victims of radicalization.

Keywords: *Adolescent Vulnerability, Cyber-Radicalization, Multilevel Resilience, National Security*

A. Pendahuluan

Ancaman terorisme global dan domestik telah mengalami metamorfosis signifikan dari strategi yang didominasi oleh serangan fisik dan rekrutmen tatap muka menjadi model yang didorong oleh teknologi dan beroperasi di ranah siber. Indonesia, sebagai negara dengan populasi internet terbesar di Asia Tenggara dan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi, berada pada garis depan tantangan siber-radikalisasi ini (UNOCT, 2021). Pergeseran ini menjadi isu krusial karena jaringan radikal tidak lagi memerlukan kamp pelatihan fisik yang mahal dan berisiko untuk menyebarkan ideologi mereka; mereka hanya membutuhkan koneksi internet dan narasi yang menarik (Huda et al., 2021).

Urgensi ancaman ini diperkuat oleh fakta bahwa infrastruktur digital, yang seharusnya menjadi katalisator pembangunan dan demokrasi, kini dimanfaatkan secara strategis oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk rekrutmen, propaganda, dan *online grooming*. Platform media sosial, aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram, dan bahkan lingkungan *online gaming* telah bertransformasi menjadi *echo chambers* dan inkubator bagi ideologi kekerasan, menjanjikan rasa memiliki, tujuan hidup, atau keadilan yang terdistorsi kepada individu yang rentan (AACAP, 2025; Huda Ismail & Kusuma Amanda, 2025). Akibatnya, mekanisme deteksi tradisional berbasis komunitas atau pengawasan fisik menjadi tidak efektif, menciptakan celah besar dalam sistem keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini secara spesifik menempatkan remaja dan pemuda (usia 15–30 tahun) sebagai target utama, bahkan sebagai aktor dalam aksi terorisme (GCERF, 2024). Keterlibatan anak dan remaja bukan lagi sekadar kasus minoritas, melainkan sebuah tren yang mengkhawatirkan.

Kasus pengeboman di Surabaya pada tahun 2018 yang melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak di bawah umur, dan insiden penyerangan lain yang dilakukan oleh remaja, menyoroti bahwa anak-anak dapat diindoktrinasi sedini mungkin, atau bahkan menjadi korban paksaan dan eksploitasi (Prastiyo & Setiabudhi, 2021). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara konsisten mengidentifikasi kelompok usia muda sebagai prioritas utama dalam program pencegahan. Kerentanan tersebut berakar pada dinamika psikososial dan perkembangan remaja. Selama fase adolesen, individu berada dalam masa pencarian identitas yang intens (*identity crisis*), sangat sensitif terhadap validasi sosial, dan cenderung mempertanyakan *status quo* (AACAP, 2025; Bronsard et al., 2022). Perasaan terasing, pengalaman diskriminasi, *bullying*, atau disfungsi keluarga dapat memperkuat kerentanan psikososial ini, menjadikan narasi radikal yang menjanjikan persaudaraan (*online sisterhood*), tujuan mulia yang diselewengkan sebagai "jihad", dan rasa memiliki sebagai 'obat penawar' (Scheuble & Oezmen, 2022; Huda et al., 2021).

Perekrut digital memanfaatkan kerentanan ini melalui proses *online grooming* yang sistematis: mereka mendekati target secara simpatik, membangun hubungan emosional, dan perlahan mengisolasi remaja dari jaringan sosial mereka yang moderat sebelum menyampaikan konten ekstremis. Lebih lanjut, remaja dan mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen pasif konten radikal, melainkan bergeser menjadi *prosumer* (produsen sekaligus konsumen) yang secara aktif menyebarkan ideologi tersebut di lingkaran digital mereka, mempercepat penyebarannya secara eksponensial (Sugihartati et al., 2020). Menghadapi ancaman yang meluas dan mendalam ini, diperlukan strategi yang tidak lagi mengandalkan hanya pada pendekatan keamanan, melainkan pada penguatan ketahanan sosial yang holistik. Fokus pencegahan harus bergeser dari sekadar merespons aksi teror menjadi membangun Benteng Pertahanan Ideologi yang kuat, yang melibatkan setiap lapisan masyarakat, mulai dari kemampuan individu menolak narasi kebencian hingga kebijakan negara yang responsif. Penelitian ini memandang bahwa penanggulangan siber-radikalisasi terhadap remaja hanya dapat dicapai melalui Transformasi Ketahanan Multitingkat, yang mengintegrasikan upaya pada level individu, komunitas, dan nasional secara terpadu.

Kendati literatur tentang radikalisasi daring di Indonesia berkembang pesat, kajian-kajian tersebut cenderung berjalan terpisah: studi psikologi perkembangan menyoroti kerentanan individu, studi komunikasi memetakan pola propaganda, dan studi kebijakan menelaah kelembagaan PVE. Belum banyak studi yang mengintegrasikan ketiga tingkat analisis tersebut ke dalam satu kerangka operasional yang utuh, apalagi yang telah menyesuaikan diri dengan arsitektur kelembagaan nasional termutakhir. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini: merumuskan kerangka Transformasi Ketahanan Multitingkat yang menghubungkan mekanisme eksploitasi psikososial di tingkat mikro dengan desain kebijakan nasional di tingkat makro, dalam konteks

spesifik siber-radikalisasi remaja Indonesia. Sebagai landasan analisis (*state of the art*), tiga badan literatur berikut menjadi pijakan.

Ideologi Radikal Terorisme dan Ekspansi Digital

Ideologi radikal terorisme harus dikaji melalui lensa karakteristik fundamental yang membedakannya dari gerakan sosial atau politik konvensional. Radikalisme adalah sebuah paham atau aliran yang secara inheren menuntut perubahan total tatanan sosial dan politik yang berlaku dengan mengabaikan jalur-jalur demokratis, cenderung menggunakan cara kekerasan, atau tindakan drastis (Wahyuni et al., 2022). Inti dari ideologi ini adalah penolakan terhadap pluralisme dan moderasi. Terdapat tiga karakteristik kunci ideologi radikal:

1. Intoleransi dan eksklusivitas. Kaum radikal memiliki keyakinan yang dogmatis dan fanatik, merasa bahwa interpretasi ideologi, agama, atau politik mereka adalah satu-satunya kebenaran (*self-righteousness*). Karakteristik eksklusivitas ini mewujudkan pemisahan diri dari masyarakat umum dan menolak dialog inter-kelompok (Wahyuni et al., 2022). Mereka cenderung menganggap perbedaan yang ada di masyarakat sebagai ancaman terhadap eksistensi dan tatanan ideologi mereka.
2. Anti-moderasi dan tekstualisme kaku. Penolakan terhadap interpretasi yang moderat atau kontekstual adalah ciri penting. Kelompok ini memegang teguh teks-teks dasar secara literal (tekstualisme), menolak reinterpretasi yang kompromistis atau adaptif (Azra, dikutip dalam Wahyuni et al., 2022). Sikap kaku ini seringkali menghasilkan pemikiran yang sempit dan melegitimasi kekerasan atas nama otoritas ideologi.
3. Justifikasi kekerasan (revolusioner). Kekerasan dilihat bukan sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai jalan yang dibenarkan (revolusioner) untuk mencapai tujuan ideologis atau menegakkan "negara ideal" (Wahyuni et al., 2022). Kelompok radikal seringkali menyelewengkan ajaran agama atau ideologi tertentu untuk membenarkan tindakan teror sebagai bentuk "jihad" atau perjuangan positif, mengabaikan kerugian massal yang ditimbulkan (Siregar & Ependi, 2021).

Pergeseran mendasar dalam penyebaran ideologi ini adalah munculnya siber-radikalisasi (*cyber-radicalization*), yaitu proses di mana individu terpapar, terindoktrinasi, dan direkrut untuk melakukan tindakan kekerasan atau ekstremisme melalui internet ((Huda et al., 2021); Kalista, 2025). Kelompok teroris, seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS di Indonesia, telah secara masif menggunakan ruang digital untuk membangun narasi, identitas, dan merekrut anggota, seringkali dalam skala yang besar (Kalista, 2025). Internet telah menjadi sarana yang memungkinkan kelompok teroris menyembunyikan identitas dan lokasi, memanfaatkan anonimitas dan kecepatan distribusi konten (Huda et al., 2021). Ekosistem rekrutmen *online* modern beroperasi melalui apa yang dalam penelitian ini

penulis konseptualisasikan sebagai *triad platform gelap (dark platform triad)*, yaitu tiga lapis kanal digital yang memungkinkan proses *grooming*:

1. Media sosial, digunakan sebagai tahap awal untuk penyebaran propaganda massal dan identifikasi target yang rentan. Konten dikemas secara profesional, visual, dan menarik, memanfaatkan mekanisme persuasi periferik untuk membangun *attitude change* yang perlahan (Kalista, 2025).
2. Aplikasi pesan terenkripsi (Telegram/WhatsApp), berfungsi sebagai ruang isolasi dan indoktrinasi yang aman. Di sini, hubungan personal antara perekrut (*handler*) dan target dibangun (*online grooming*), memungkinkan penyebaran materi yang lebih ekstrem tanpa pengawasan publik.
3. *Online gaming* dan forum tertutup, digunakan untuk identifikasi kerentanan dan pengujian loyalitas awal. Lingkungan yang santai dan anonim ini memungkinkan perekrut untuk menguji tanggapan remaja terhadap pernyataan radikal dan kemudian mengarahkan mereka ke platform yang lebih tertutup.

Ekspansi digital ini menjadikan ancaman ideologis bersifat *borderless* dan memanfaatkan potensi pengguna internet yang besar di Indonesia sebagai aset sekaligus sebagai risiko terbesar (Huda et al., 2021).

Teori Kerentanan Remaja (*Adolescent Vulnerability*)

Pemahaman mengenai mengapa remaja menjadi sasaran utama rekrutmen digital berakar pada psikologi perkembangan, khususnya pada tahap Identitas vs. Kebingungan Peran (*Identity vs. Role Confusion*) yang dipopulerkan oleh Erik Erikson. Tahap ini, yang terjadi sekitar usia 12 hingga 18 tahun, adalah titik balik (*turning point*) di mana remaja secara aktif berusaha membentuk identitas diri yang kohesif, mandiri, dan stabil (Erikson, 1968; Gross, 2020). Tugas utama pada tahap kelima perkembangan psikososial ini adalah mencapai *fidelity*, yaitu kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri dan nilai-nilai inti (Gross, 2020). Remaja yang berhasil melewati fase ini dengan dukungan yang memadai akan keluar dengan *sense of self* yang kuat, jelas mengenai nilai, tujuan, dan arah hidup mereka (Tettey et al., 2023). Sebaliknya, kegagalan resolusi tahap ini menyebabkan kebingungan peran (*role confusion*), ditandai oleh ketidakpastian tentang nilai, keyakinan, dan tempat mereka dalam masyarakat. Erikson memandang masa remaja sebagai masa *moratorium* psikososial, di mana eksplorasi peran, aktivitas, dan perilaku sangat penting (Erikson, 1968). Namun, ketika eksplorasi ini dibatasi, terlalu menekan, atau tidak didukung, remaja menjadi rentan terhadap ideologi radikal karena dua hal. *Pertama*, pencarian identitas yang mendesak: remaja yang kebingungan peran cenderung mencari ideologi yang memberikan identitas siap pakai yang kuat dan sederhana, alih-alih melalui proses eksplorasi yang sulit. *Kedua*, kebutuhan untuk diterima (*need for belonging*): kerentanan ditingkatkan oleh perasaan isolasi, trauma yang tidak teratasi, atau masalah kesehatan mental. Jaringan radikal *online* secara cerdas mengisi kekosongan ini dengan menawarkan persaudaraan instan dan penerimaan tanpa syarat (Ellis et al., 2024).

Radikalisasi remaja adalah hasil dari konvergensi antara faktor-faktor yang mendorong mereka menjauh dari masyarakat normal (*push factors*) dan faktor-faktor yang menarik mereka ke dalam kelompok ekstremis (*pull factors*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Pendorong dan Penarik Radikalisasi Remaja

Faktor	Manifestasi dalam Konteks Indonesia
<i>Push Factors</i> (Pendorong)	Dipicu oleh ketidakpuasan pribadi, kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja (<i>lack of opportunities</i>), trauma, serta perasaan diprofilkan (<i>perceived profiling</i>) atau diskriminasi oleh pihak berwenang. Semua ini menghasilkan rasa kehilangan signifikansi (<i>perceived loss of significance</i>) (Ellis et al., 2024).
<i>Pull Factors</i> (Penarik)	Meliputi janji keberanian dan pemberdayaan (<i>sense of heroism and empowerment</i>), akses mudah untuk bergabung, rasa memiliki dan persahabatan (<i>sense of belonging</i>), dan janji imbalan spiritual atau material (Ellis et al., 2024). Narasi kelompok radikal memanfaatkan aspek ini sebagai solusi revolusioner terhadap <i>push factors</i> yang mereka rasakan.

Sumber: diolah dari (Ellis et al., 2024)

Menurut BNPT, kelompok yang paling rentan terhadap radikalisme adalah pemuda berusia 11–26 tahun yang aktif di internet, menunjukkan bahwa akses digital mempercepat dan memperkuat interaksi antara *push factors* dan *pull factors* (Sahal & Bayuseto, 2022).

Konsep Ketahanan (Resiliensi) Multitingkat

Konsep resiliensi atau ketahanan adalah kemampuan suatu sistem baik individu, komunitas, maupun negara untuk bertahan, beradaptasi, dan kembali ke kondisi semula setelah mengalami guncangan atau tekanan (Holling, 1973). Dalam konteks ancaman ideologi radikal digital, diperlukan Ketahanan Multitingkat sebagai Benteng Pertahanan Ideologi yang terintegrasi.

Ketahanan Diri (*Self-Resilience*)

Ketahanan diri adalah kapasitas individu untuk mengelola emosi dan kognisi secara positif, bangkit dari kesulitan, dan beradaptasi secara efektif terhadap tekanan (Ifdil & Taufik, 2012, dikutip dalam Faridah et al., 2025). Dalam konteks digital, ketahanan diri berfokus pada: (1) *critical thinking*, yaitu kemampuan kognitif untuk melakukan refleksi kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara logis, yang sangat vital untuk menolak manipulasi ideologis (Saputro, 2025); dan (2) *critical media literacy*, yang melampaui kemampuan teknis: keterampilan yang memungkinkan individu secara kritis mengevaluasi dan memahami pesan yang masuk melalui media *online*. Remaja dengan literasi media yang baik mampu mendeteksi misinformasi dan manipulasi digital, sehingga mengurangi kerentanan psikologis mereka (Potter, dikutip dalam Rany et al., 2025; (Dwiningrum et al., 2023)). Peningkatan resiliensi

kognitif ini sangat penting untuk mencegah remaja menjadi sasaran empuk *online grooming*.

Ketahanan Komunitas (*Social Resilience*)

Ketahanan komunitas adalah kemampuan institusi sosial dan jaringan lokal untuk menyediakan faktor-faktor pelindung (*protective factors*) yang mengurangi kerentanan remaja. Konsep ini mengakui bahwa resiliensi adalah hasil dari interaksi individu di dalam sistem sosial (Hawley & DeHaan, 1996, dikutip dalam Kurniawati, 2023). Peran kunci dimainkan oleh tiga institusi. *Pertama*, keluarga sebagai benteng pertama (Olson & DeFrain, 2003, dikutip dalam Kurniawati, 2023): ketahanan keluarga bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga menggunakan kesulitan untuk mengembangkan diri dan hubungan. Keluarga yang menerapkan komunikasi terbuka (*shura*), nilai agama yang moderat (*taqwa, sabr*), dan dukungan emosional mampu mencegah alienasi yang menjadi *push factor* utama (Ridlwan & Fitriana, 2024). *Kedua*, sekolah dan institusi pendidikan yang berfungsi sebagai agen adaptasi, menyediakan intervensi untuk mengatasi risiko lingkungan dan mengembangkan keterampilan adaptasi siswa (Dwiningrum et al., 2023). *Ketiga*, tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam mensosialisasikan ajaran agama yang toleran dan inklusif, serta memberikan kontra-narasi yang kredibel dan efektif untuk melawan narasi radikal berbasis agama (Muhasim et al., 2024).

Ketahanan Nasional (*National Security/Policy*)

Ketahanan nasional diartikan sebagai kemampuan negara untuk melindungi ideologi dan sistem pemerintahannya, yang dalam konteks modern harus mencakup ruang siber. Ini memerlukan kebijakan yang terintegrasi (UNOCT, 2021). Tiga komponennya meliputi: (1) strategi kontra-narasi skala nasional sebagai respons langsung dan terstruktur terhadap propaganda digital bukan hanya penghapusan konten, tetapi pengembangan narasi alternatif yang cepat dan multidisipliner, menjangkau remaja di platform yang mereka gunakan (UNOCT, 2021); (2) regulasi dan keamanan siber, di mana negara memastikan kerangka hukum yang sinergis, seperti integrasi kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komdigi, untuk melindungi infrastruktur informasi dan data pribadi yang sering menjadi sasaran (Rongiyati, 2021); serta (3) integrasi *Preventing Violent Extremism* (PVE), di mana program-program BNPT diimbangi dengan strategi pencegahan yang menyentuh akar *push factors* (misalnya kemiskinan dan pendidikan) untuk menguatkan stabilitas negara secara fundamental.

Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi secara mendalam faktor psikososial yang membuat remaja rentan di lingkungan digital, serta memetakan pola-pola spesifik *online grooming* dan narasi radikal yang paling efektif digunakan oleh kelompok ekstremis dalam konteks budaya dan teknologi Indonesia; dan (2) merumuskan Model Ketahanan Multitingkat

yang komprehensif, mengintegrasikan strategi *digital literacy* untuk individu, program penguatan peran keluarga dan sekolah untuk komunitas, serta rekomendasi kebijakan siber dan kontra-narasi terstruktur di tingkat nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya konsep *digital resilience* dan *adolescent vulnerability* dalam konteks spesifik Indonesia, di mana perpaduan antara identitas keagamaan dan penggunaan media sosial menjadi faktor penting. Secara praktis, hasil penelitian menyajikan rekomendasi konkret bagi BNPT, Komdigi, institusi pendidikan, dan pemimpin komunitas untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih terfokus, cepat, dan terintegrasi.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana mekanisme eksploitasi kerentanan psikososial remaja Indonesia diimplementasikan secara spesifik oleh jaringan radikalasi *online*, termasuk pola-pola *online grooming* dan narasi yang digunakan? *Kedua*, bagaimana model Ketahanan Multitingkat harus diintegrasikan dan ditransformasikan mulai dari peningkatan resiliensi diri individu, penguatan peran institusi komunitas, hingga harmonisasi kebijakan keamanan nasional guna menciptakan benteng pertahanan ideologi yang efektif terhadap ancaman siber-radikalasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi pustaka naratif (*narrative literature review*) yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan kualitatif. Desain naratif dipilih alih-alih tinjauan literatur sistematis (SLR) penuh karena tujuan penelitian bersifat konseptual-integratif, yaitu merumuskan kerangka Transformasi Ketahanan Multitingkat, bukan mensintesis efek intervensi tertentu secara ekshaustif. Konsekuensinya, penelitian ini tidak menerapkan protokol PRISMA maupun penghitungan artikel tersaring secara formal; hal ini diakui sebagai keterbatasan metodologis.

Sumber literatur diidentifikasi melalui basis data Google Scholar, portal jurnal nasional (SINTA/GARUDA), serta repositori lembaga resmi, dengan rentang terbit 2020–2025, sesuai ketentuan jurnal yang membatasi rujukan pada terbitan enam tahun terakhir. Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain: "siber-radikalasi"/"radikalasi *online*", "radikalasi remaja", "*cyber radicalization*" dan "*adolescents*", "resiliensi remaja", "literasi digital kritis", serta "pencegahan ekstremisme kekerasan (PVE/PCVE) Indonesia". Dari hasil penelusuran tersebut, sebanyak 50 sumber ditelaah secara mendalam dan dikutip dalam artikel ini, terdiri atas 31 artikel jurnal, satu bab buku, empat buku/monograf, serta 14 laporan, dokumen, dan publikasi lembaga resmi – antara lain dari BNPT, GCERF, UNOCT/UNICRI, NIJ, Komisi Eropa (DG Home Affairs), Kementerian Agama, Kemdiktisaintek, Kementerian PANRB, dan DPR RI. Sejumlah kecil sumber klasik dipertahankan sebagai rujukan teoretis primer yang tidak tergantikan, yaitu Erikson (1968) untuk teori perkembangan psikososial, Holling (1973) untuk konsep

resiliensi sistem, dan Crone (2016) untuk teori radikalisisasi. Kriteria pemilihan meliputi: (1) relevansi terhadap radikalisisasi remaja, radikalisisasi *online*, resiliensi, atau kebijakan PVE/PCVE; (2) konteks Indonesia atau Asia Tenggara diutamakan; dan (3) kredibilitas penerbit (jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi seperti BNPT, UNODC, GCERF, atau lembaga kajian bereputasi).

Data dianalisis menggunakan dua tahap utama. *Pertama*, analisis narasi (*narrative analysis*), digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan pola *online grooming*, narasi eksploitasi (*love bombing*, isu global), serta taktik *shifting loyalty* dalam jaringan radikal. *Kedua*, analisis model kebijakan (*policy model analysis*), digunakan untuk merumuskan kerangka kerja Transformasi Ketahanan Multitingkat, dengan membandingkan efektivitas program PVE yang sudah berjalan (BNPT, kementerian bidang pendidikan) dengan kebutuhan resiliensi individu dan komunitas.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, sebagai konsekuensi desain naratif, penelitian ini tidak menerapkan protokol PRISMA maupun penghitungan artikel tersaring secara formal. Kedua, data mengenai *online grooming* dan proses radikalisisasi sering bersifat tertutup, sehingga analisis mekanisme eksploitasi didasarkan pada laporan sekunder dan studi kasus publik. Ketiga, Model Transformasi Ketahanan yang diusulkan adalah kerangka konseptual yang membutuhkan penelitian lapangan dan uji validitas empiris lebih lanjut (misalnya melalui survei atau *Focus Group Discussion*) untuk mengukur efektivitasnya dalam konteks lokal Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Identifikasi Faktor Kerentanan Remaja di Indonesia

Kerentanan remaja Indonesia terhadap ideologi radikal terorisme adalah hasil konvergensi dari faktor psikologis individu, kondisi sosial-ekonomi yang memarginalisasi, dan lingkungan digital yang memfasilitasi. Kerentanan ini menjadi pintu masuk (*vulnerability entry point*) yang sistematis bagi jaringan radikal.

Penelitian BNPT secara konsisten menempatkan kelompok usia muda sebagai target prioritas, didorong oleh keterbelakangan pendidikan dan rendahnya literasi budaya yang memicu radikalisme. Sebagai penanda awal tren, survei Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017 menemukan bahwa sekitar 39% mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi Indonesia telah terpapar paham radikal (BIN, 2017, dikutip dalam Dwiningrum et al., 2023) temuan yang kini berusia hampir satu dekade, namun menandai titik ketika paparan radikalisme di institusi pendidikan formal mulai terdokumentasi secara luas. Pengukuran resmi yang lebih baru menunjukkan bahwa dinamika tersebut belum selesai: Indeks Potensi Radikalisme (IPR) nasional yang diukur BNPT tercatat 12,2% pada 2020 dan turun menjadi 10% pada 2022 (Kementerian PANRB, 2022), tetapi kembali naik menjadi 11,7% pada 2023 dengan kerentanan tertinggi

justru pada generasi muda (ANTARA News, 2025). Tinjauan literatur dan temuan BNPT menunjukkan bahwa remaja yang terlibat radikalisme memiliki profil yang beragam, namun terdapat empat faktor pendorong yang konsisten:

1. Krisis identitas dan konflik psikologis. Remaja, khususnya mereka yang berada dalam tahap *identity vs. role confusion* (Erikson, 1968), yang gagal menemukan *sense of self* yang stabil, menjadi sasaran empuk. Kegagalan ini sering diperburuk oleh isolasi sosial, kurangnya komunikasi positif dengan orang dewasa, atau perpecahan komunikasi sosial dengan orang-orang terdekat (Lubis & Siregar, 2020). Akibatnya, kelompok radikal menawarkan identitas kolektif yang kuat dan terdefinisi dengan narasi kepahlawanan, yang dianggap "keren dan berani" oleh pemuda yang mencari eksistensi (Lewoleba, 2023).
2. Faktor pendidikan dan pemahaman agama yang harfiah. Remaja yang baru mengenal ilmu agama atau memiliki pemahaman keagamaan yang kering dan harfiah (tekstualis) sangat rentan (Lubis & Siregar, 2020; Lewoleba, 2023). Pemahaman yang sempit ini membuat mereka mudah menerima interpretasi yang eksklusif dan segregatif. Keterbelakangan pendidikan atau rendahnya literasi budaya dan sosial juga memicu radikalisme yang berujung pada terorisme (Tahir & Tahir, 2020).
3. Faktor sosial-ekonomi dan kekecewaan politik. Meskipun tidak selalu menjadi faktor tunggal, kondisi sosial-ekonomi yang berkekurangan sering dieksploitasi. Kaum muda yang mengalami kesulitan ekonomi dan mencari eksistensi diri menjadi target iming-iming pekerjaan atau gaji tinggi dari kelompok teroris (Sholeh, 2018). Selain itu, akumulasi kekecewaan terhadap ketidakadilan politik, marjinalisasi dalam sektor ekonomi, dan anggapan bahwa pemerintah tidak mampu memperbaiki situasi dominasi ideologi global memicu sikap frustrasi dan amarah yang diarahkan kepada negara (Wahyuni et al., 2022).
4. Individualisme digital. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial yang intensif di kalangan remaja telah menciptakan pribadi yang lebih individualistik, yang secara paradoks membuat mereka rentan terhadap rayuan *online* (Lubis & Siregar, 2020). Isolasi dalam kamar dengan *smartphone* atau laptop menciptakan kondisi ideal bagi siber-radikalisasi untuk bekerja tanpa terdeteksi oleh pengawasan orang tua.

Disinformasi dan hoaks yang diberi embel-embel agama merupakan pintu gerbang kognitif awal menuju radikalisme (Munabiah & Saidah, 2023). Kelompok radikal menggunakan hoaks agama untuk menciptakan narasi ketakutan, ketidakpercayaan, dan perpecahan umat beragama (Munabiah & Saidah, 2023). Mekanismenya bekerja melalui dua jalur. *Pertama*, menciptakan loyalitas terbelah (*split loyalty*): hoaks dan disinformasi agama bertujuan menciptakan loyalitas yang berlawanan antara nilai-nilai keagamaan yang diinterpretasikan secara ekstrem dengan loyalitas kenegaraan dan kebangsaan (Lubis & Siregar, 2020). Contohnya, hoaks yang menyerang kebijakan pemerintah atau isu korupsi di instansi keagamaan, dicampur dengan narasi bahwa agama diserang, memicu kemarahan dan membenarkan sikap antinegara (Komdigi, 2019; Wahyuni et al., 2022). *Kedua*, eksploitasi ketiadaan literasi

kritis: masyarakat Indonesia, termasuk remaja, memiliki kelemahan dalam kemampuan pengecekan data (*tabayyun*) dan nalar yang sehat, sehingga informasi radikal yang disajikan secara emosional dan anonim dianggap benar (Munabiah & Saidah, 2023). Kementerian Agama bahkan mengingatkan bahwa upaya penguatan Moderasi Beragama seringkali dihadapkan pada tantangan hoaks digital (Kemenag, 2022). Oleh karena itu, literasi digital menjadi solusi penanganan hoaks keagamaan yang harus dioptimalkan (Munabiah & Saidah, 2023).

Pola Online Grooming dalam Jaringan Radikal

Proses *online grooming* adalah mekanisme inti dari siber-radikalisasi, di mana perekrut radikal membangun hubungan emosional yang manipulatif dengan remaja target. Jaringan radikal tidak merekrut melalui ancaman di awal, melainkan melalui persuasi afektif yang memanfaatkan kerentanan psikologis remaja (Kalista, 2025). Taktik kuncinya meliputi:

1. Taktik *love bombing* dan *sense of belonging*. Perekrut (seringkali menggunakan identitas fiktif atau pseudonim yang karismatik) memberikan perhatian, pujian, dan validasi yang sangat intensif (*love bombing*). Mereka mengisi kekosongan emosional remaja yang merasa terisolasi, menawarkan persahabatan instan, penerimaan, dan tujuan hidup yang hilang (Ellis et al., 2024).
2. Pemanfaatan isu global sebagai pemicu (*trigger*). Isu-isu konflik global, seperti penderitaan Muslim di Palestina, Uighur, atau Suriah, digunakan sebagai pemicu emosional. Narasi ini disajikan dengan visual yang kuat dan emosional, memicu solidaritas keagamaan yang diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk bertindak (Lewoleba, 2023). Remaja didorong merasa bahwa mereka memiliki peran heroik dan revolusioner untuk mengubah ketidakadilan tersebut.
3. Proses isolasi dan *shifting loyalty*. Setelah target terikat secara emosional, *digital handler* akan memulai proses isolasi. Mereka mendorong remaja untuk menjauhi lingkungan sosial dan keluarga yang dianggap "sekuler", "kafir", atau "menghalangi jihad", sehingga loyalitas remaja beralih sepenuhnya kepada jaringan *online* radikal tersebut (Lubis & Siregar, 2020).

Kasus-kasus terorisme di Indonesia menunjukkan pola *online to offline* yang khas. Sebagai contoh, insiden penyerangan di Gereja Santo Yosep Medan (2016) yang melibatkan remaja berinisial IAH dan kasus JAD di Pemalang membuktikan bahwa proses radikalisasi seringkali terjadi sepenuhnya secara *online*, didorong oleh *digital handler* di luar kesadaran orang tua maupun aparat (Huda Ismail & Kusuma Amanda, 2025).

Dalam ekosistem ini, dua aktor memainkan peran sentral. *Pertama*, *digital handler* sebagai mentor ideologis yang membimbing remaja melewati fase *moratorium* psikososial, menawarkan identitas yang jelas dan kaku (Gross, 2020). Mereka memiliki keahlian dalam mengenali tanda-tanda kebingungan peran dan memanfaatkannya dengan memberikan jawaban sederhana terhadap masalah

kompleks. *Kedua*, *influencer* radikal pada tahap *soft-recruitment* baik tokoh karismatik maupun *content creator* anonim yang memproduksi propaganda menarik, memanfaatkan platform seperti Telegram atau YouTube untuk menyebarkan narasi agresi, frustrasi, dendam, serta narasi teror dan ketidakberdayaan yang berfungsi sebagai dasar aksi teroris (Amalia Hamida & Lubabin Nuqul, 2020).

Dampak Psikososial Eksploitasi

Eksploitasi kerentanan remaja dalam jaringan radikal menghasilkan dampak psikososial yang parah, mengubah struktur kognitif dan perilaku mereka, yang pada akhirnya meningkatkan potensi keterlibatan dalam aksi teror. Proses indoktrinasi yang berhasil menghasilkan transformasi identitas dari individu yang bingung menjadi anggota yang termotivasi (Crone, 2016). Dampak psikososial utamanya adalah sebagai berikut.

1. *Negative identity* dan rasa dendam. Radikalisasi seringkali berakar pada perasaan kecewa, dendam, atau sakit hati yang belum terhapuskan. Jaringan radikal memberikan identitas negatif yang didasarkan pada penolakan total terhadap tatanan yang ada. Identitas ini bersifat eksklusif, membatasi interaksi hanya dengan kelompok *in-group* dan menolak interaksi dengan *out-group* (masyarakat moderat/pemerintah).
2. Segregasi dan intoleransi kognitif. Pembentukan identitas eksklusif didukung oleh pemikiran tertutup (*closed-mindedness*) yang mengurangi kemampuan untuk menerima perspektif baru (Amalia Hamida & Lubabin Nuqul, 2020). Hal ini menciptakan segregasi sosial dan kognitif di mana remaja percaya bahwa kebenaran mutlak hanya ada dalam perspektif kelompok radikal mereka. Akibatnya, pluralisme agama dan multikulturalisme dipandang sebagai ancaman serius yang harus dilawan (Kewuel, 2019).

Anak dan remaja yang telah terpapar dan terlibat dalam jaringan radikal tidak hanya mengalami perubahan ideologi, tetapi juga menghadapi risiko psikologis dan keamanan yang akut. *Pertama*, trauma dan gangguan mental: remaja yang terlibat atau dieksploitasi oleh kelompok ekstremis (termasuk sebagai anak dari eks-narapidana terorisme atau pelaku aksi) sering menjadi sasaran kekerasan dan mengalami trauma parah, termasuk Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD), depresi, rasa bersalah, dan kehilangan kemampuan merasakan emosi positif (UNOCT, 2021). Kondisi ini menciptakan siklus kekerasan di mana trauma dapat mendorong keterlibatan lebih lanjut atau berulang. *Kedua*, radikalisasi kognitif vs. perilaku: eksploitasi ini dapat menghasilkan radikalisasi kognitif (perubahan pikiran) dan radikalisasi perilaku (transformasi menjadi tindakan kekerasan, termasuk kesediaan melakukan pengeboman atau aksi teror) (Crone, 2016). Kerentanan psikologis dan persepsi risiko yang rendah pada remaja meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan persetujuan – atau bahkan inisiatif – terhadap aksi teror (UNOCT, 2021). Keterlibatan pemuda dalam aksi terorisme memiliki implikasi serius terhadap ketahanan nasional (Dwiningrum et al., 2023). Oleh karena itu, intervensi yang efektif

harus menyentuh kedua dimensi ini: mengoreksi radikalisasi kognitif melalui kontra-narasi dan menyembuhkan dampak psikologis melalui program deradikalisasi berbasis trauma (Adawiah Al, 2021).

Transformasi Level Individu: Resiliensi Kognitif dan Digital

Ketahanan diri remaja adalah lapisan pertahanan ideologis yang paling fundamental, berfokus pada pengembangan kemampuan internal untuk menahan narasi kebencian (*hate speech*) dan manipulasi digital. Transformasi ini menuntut reorientasi dari sekadar kecakapan teknis menjadi resiliensi kognitif.

Mengingat rendahnya literasi kritis remaja meskipun akses digital tinggi, integrasi *Critical Digital Literacy* (CDL) tidak cukup hanya dilakukan melalui kurikulum formal sekolah (Rany et al., 2025). Implementasi CDL harus bergerak ke ranah non-formal dengan pendekatan yang kontekstual dan adaptif (Saputro, 2025). *Pertama*, melalui pendekatan *Project-Based Learning* (PjBL) komunitas: remaja tidak hanya diajarkan cara memfilter informasi, tetapi didorong untuk melakukan *fact-checking* terhadap isu-isu radikal yang beredar dan memproduksi konten kontra-narasi (misalnya infografis atau *podcast*) yang dapat dipertanggungjawabkan (Cahyani et al., 2021; Rany et al., 2025). Proses ini memberikan pengalaman nyata dan meningkatkan keterampilan 4C (*critical thinking, communication, collaboration, creativity*). *Kedua*, melalui pelatihan berbasis komunitas belajar (webinar/lokakarya): pelatihan intensif di luar jam sekolah, yang dipandu oleh guru, fasilitator literasi digital non-pemerintah, atau mentor, dapat menjadi wadah *self-reflection* dan *critical reflection* terhadap konten ekstremis (Dewi & Sunarni, 2024). Tujuannya adalah menumbuhkan kemampuan menilai sumber informasi dan memilah mana yang benar dan salah.

Resiliensi psikologis (kemampuan bangkit dari keterpurukan) secara langsung terkait dengan penanggulangan *push factors* seperti alienasi dan rendahnya *self-esteem* yang dieksploitasi oleh kelompok radikal (Ramadhani & Nur, 2025). *Pertama*, penguatan *self-esteem* dan *sense of mastery*: program pengembangan keterampilan resiliensi terbukti dapat meningkatkan *self-esteem* pada remaja. Intervensi harus fokus pada pemberian motivasi, penumbuhan rasa percaya diri, dan penguasaan keterampilan tertentu agar remaja tidak mencari validasi dari kelompok ekstremis (Putri, 2024). *Kedua*, pendidikan empati dan relasi positif: pengembangan resiliensi harus mencakup dimensi emosional, yaitu kemampuan mengelola perasaan dan mengembangkan relasi positif dengan orang lain. Resiliensi psikologis berbasis empati dan toleransi sangat penting untuk melawan ideologi eksklusif. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang mendorong *self-acceptance*, regulasi emosi, dan toleransi terhadap pengalaman negatif, sehingga remaja mampu menyadari bahwa keragaman adalah norma, bukan ancaman (Ramadhani & Nur, 2025).

Transformasi Level Komunitas: Integrasi Keluarga dan Institusi

Ketahanan komunitas adalah jembatan yang menghubungkan resiliensi individu dengan kebijakan nasional. Transformasi ini menuntut agar institusi lokal terutama keluarga dan tokoh agama diaktifkan sebagai agen kontra-radikalisasi.

Perempuan, khususnya ibu, memiliki peran vital dan seringkali terabaikan dalam deradikalisasi. Perempuan memiliki tiga peran utama (domestik, produksi, publik) dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika keluarga (Marnani et al., 2024). *Pertama*, deteksi dini berbasis keluarga: perempuan memainkan peran penting dalam deteksi dini radikalisasi karena mereka lebih akrab dengan perilaku sehari-hari dan penggunaan internet anak-anak (Kurniawati, 2023). Sidney (dikutip dalam Kurniawati, 2023) menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dengan keterampilan deteksi dini adalah solusi karena mereka merupakan *first responder* di rumah. *Kedua*, agen kontra-narasi domestik: perempuan harus diberdayakan sebagai edukator dan agen perubahan untuk mempromosikan Islam yang moderat di dalam keluarga (Mulia, dikutip dalam Musyafak et al., 2020). Organisasi perempuan seperti PKK, Fatayat NU, dan Aisyiyah dapat dilibatkan secara aktif dalam program kontra-narasi berbasis penghayatan Pancasila dan gotong royong, yang secara langsung bertentangan dengan paham radikalisme (Marnani et al., 2024; Musyafak et al., 2020).

Model penguatan komunitas harus menyediakan ruang aman dan menyenangkan bagi remaja, memutus rantai isolasi yang difasilitasi oleh *online grooming*. *Pertama*, *youth center* sebagai ruang adaptasi dan resiliensi: pusat kegiatan pemuda harus difungsikan sebagai lingkungan tumbuh kedua yang menyediakan fasilitas edukasi resiliensi (Putri, 2024). Ini adalah tempat di mana *push factors* seperti alienasi diatasi melalui dukungan sosial dan pengembangan bakat, memberikan *sense of belonging* yang konstruktif sebagai tandingan dari tawaran kelompok radikal (Sunarti et al., 2025). *Kedua*, pendekatan *peer-to-peer* (P2P): P2P yang melibatkan remaja atau mantan korban radikalisasi sebagai Duta Damai adalah metode efektif karena remaja cenderung lebih mendengarkan teman sebaya. Model ini harus menggunakan metode yang menarik, seperti demonstrasi atau kunjungan lapangan (*karyawisata/ study tour*) ke tempat bersejarah atau forum dialog, untuk memberikan pemahaman yang aktual, bukan verbalisme ideologis.

Tokoh agama lokal harus mentransformasikan diri menjadi *influencer* perdamaian. Keberhasilan mereka dalam membangun ketahanan komunitas bergantung pada kapasitas menyebarkan narasi keagamaan inklusif di ruang digital. *Pertama*, digitalisasi dakwah moderat: konten-konten kreatif berbasis digital yang menjangkau generasi Z dan milenial harus diproduksi oleh humas pemerintah dan organisasi keagamaan (SIMLITBANG Kemenag RI, 2022). *Kedua*, fokus pada nilai *tawakal*, *sabr*, dan *rahmah*: narasi harus menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dan resolusi konflik modern (Ridlwan & Fitriana, 2024). Tokoh agama perlu aktif memberikan

narasi alternatif yang mampu mengatasi *grievances* global dengan menekankan nilai kesabaran, syukur, dan kasih sayang, bukan kekerasan.

Transformasi Level Nasional: Integrasi Kebijakan dan Keamanan Siber

Transformasi ketahanan di tingkat nasional harus didasarkan pada sinergi yang utuh, dari regulasi hulu hingga program hilir (*re-entry*). Saat ini, program PVE tersebar di berbagai kementerian, namun terdapat tantangan dalam menyamakan definisi dan terminologi kunci PVE, serta kurangnya payung hukum yang memuat seluruh terminologi terkait (INFID, 2023).

Pertama, integrasi kelembagaan. Dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk menciptakan Mekanisme Koordinasi Nasional (MKN) permanen yang mengintegrasikan tiga pilar: (1) BNPT sebagai pemegang komando PVE dan deradikalisasi; (2) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator siber, berwenang dalam penghapusan konten ekstremis dan penguatan keamanan siber; dan (3) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebagai implementor kurikulum pendidikan karakter dan literasi ideologi kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi, menjadikan kampus sebagai benteng kebangsaan (Kemendiktisaintek, 2025).

Kedua, PVE berbasis data dan lintas sektor. Kebijakan PVE harus dirancang secara multidisipliner dan berbasis data. Kementerian bidang pendidikan perlu didorong untuk mempermudah izin pelaksanaan program PVE di lembaga pendidikan, sementara BNPT harus menyusun strategi bersama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk program deradikalisasi jangka panjang yang berkelanjutan (INFID, 2023). *Ketiga*, model PVE-ekonomi inklusif: integrasi PVE di tingkat nasional harus mencakup upaya mengatasi kerentanan ekonomi remaja dengan mendukung program kewirausahaan atau pelatihan *digital skills* yang berorientasi pasar bagi kelompok muda rentan. Memperkuat ekonomi lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi pemuda akan mengurangi daya tarik *pull factors* berupa iming-iming materi dari jaringan radikal.

Kontra-narasi nasional harus dirancang untuk menandingi dan mengecilkan pengaruh narasi negatif yang bernada ekstremis (Wahid Foundation, 2025). Strategi harus mengoperasionalkan konsep "menyenangkan" (*fun*) dan "relevan" (*relatable*) melalui penggunaan bahasa non-formal, estetika visual digital (misalnya *meme* yang relevan dengan remaja), dan penekanan pada nilai perdamaian sebagai gaya hidup, bukan sekadar doktrin keamanan. Kontra-narasi harus cepat memutus *pipeline* narasi induk yang bernada diskriminasi dan dehumanisasi, yaitu akar dari ideologi radikal, dan masif di platform yang didominasi remaja. Kontra-narasi yang kaku atau berbau pemerintah cenderung diabaikan; tujuan strategisnya adalah

membangun narasi positif (perdamaian dan toleransi) yang lebih kuat di benak remaja, tidak selalu harus menanggapi langsung narasi ekstremis.

Ancaman radikalisasi berulang (*residivisme*) tetap tinggi jika mantan narapidana terorisme (eks-napiter) dan keluarganya (khususnya anak-anak) ditolak oleh masyarakat. *Pertama*, pendanaan berkelanjutan: pemerintah perlu menjamin akses kepada pendanaan yang berkelanjutan untuk program deradikalisasi dan *re-entry* yang dijalankan oleh CSO, tidak hanya yang berbasis keamanan (INFID, 2023). Program *re-entry* harus holistik, mencakup pemulihan trauma, pelatihan keterampilan ekonomi, dan penerimaan sosial. *Kedua*, SDM untuk pemulihan trauma: diperlukan alokasi SDM dan anggaran yang memadai untuk merehabilitasi anak-anak dari pelaku terorisme. Anak-anak ini sering menjadi korban ganda (korban eksploitasi dan stigma), menderita PTSD dan masalah psikologis lainnya (UNOCT, 2021). Program *re-entry* harus berfokus pada pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*), memastikan anak-anak ini mendapatkan pendampingan psikologis, pendidikan, dan diterima kembali oleh komunitas tanpa stigma.

Temuan yang Tidak Sejalan

Meskipun demikian, tidak seluruh literatur sejalan dengan penekanan kognitif model yang diusulkan. Crone (2016) berargumen bahwa radikalisasi tidak selalu diawali oleh perubahan ideologis-kognitif, melainkan dapat berlangsung terlebih dahulu melalui dimensi tubuh dan keterampilan kekerasan (*skills of the body*) – kritik yang mengingatkan bahwa intervensi berbasis literasi digital saja tidak akan menjangkau jalur radikalisasi yang bersifat behavioral. Demikian pula, temuan (Sugihartati et al., 2020) mengenai pergeseran remaja menjadi *prosumer* menunjukkan bahwa remaja bukan sekadar korban pasif *grooming* sebagaimana diasumsikan sebagian kerangka perlindungan, melainkan aktor yang secara aktif memproduksi dan menyebarkan konten radikal; hal ini menuntut desain intervensi yang memperhitungkan agensi remaja, bukan semata proteksi. Kedua temuan tersebut membatasi generalisasi model Transformasi Ketahanan Multitingkat dan menegaskan kembali kebutuhan validasi empiris yang telah diakui pada bagian metode.

Implikasi Kebijakan dan Arah Penelitian Lanjutan

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rekomendasi kebijakan: (1) pembentukan Gugus Tugas Lintas-Sektor Remaja Digital melalui Mekanisme Koordinasi Nasional (MKN) permanen yang melibatkan BNPT, Komdigi, Kemendikdasmen/Kemendiktisaintek, dan perwakilan organisasi perempuan serta pemuda, dengan mandat menyelaraskan terminologi dan kebijakan PVE di semua kementerian (INFID, 2023) serta membangun *National Counter-Narrative Platform* yang cepat, masif, dan berorientasi pada budaya remaja; (2) integrasi regulasi siber dan *trauma-informed approach*, melalui kerangka hukum keamanan siber dan perlindungan data pribadi yang tegas membatasi ruang gerak platform radikal (Rongiyati, 2021),

disertai jaminan alokasi anggaran dan SDM untuk program *re-entry* berbasis trauma, khususnya bagi anak-anak eks-napiter, guna memutus siklus kekerasan dan stigma (UNOCT, 2021); serta (3) penguatan ekonomi dan literasi perempuan, di mana program pemberdayaan perempuan (melalui PKK, Fatayat NU, dan lainnya) diperkuat tidak hanya sebagai agen edukasi, tetapi juga diberi dukungan ekonomi dan *digital skills* agar memiliki daya tawar tinggi dan kemampuan deteksi dini yang efektif (Marnani et al., 2024).

Untuk penelitian lanjutan: (1) evaluasi efektivitas program *peer-to-peer* (seperti Duta Damai BNPT) secara empiris untuk mengukur dampak spesifiknya terhadap perubahan kognitif dan perilaku remaja dalam menolak radikalisme; dan (2) analisis longitudinal resiliensi kritis untuk melihat korelasi antara tingkat *critical thinking* dengan tingkat paparan dan penerimaan narasi radikal, yang dapat memberikan data akurat bagi perancangan kurikulum CDL yang lebih tepat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab dua pertanyaan riset sekaligus. Pertama, terkait proses siber-radikalisasi, ditemukan bahwa remaja Indonesia direkrut melalui eksploitasi kerentanan psikososial pada tahap Identity vs. Role Confusion (Erikson). Pola online grooming yang khas terdiri dari tiga fase: love bombing untuk membangun ikatan emosional, pemanfaatan isu global sebagai pemicu kemarahan moral, dan isolasi bertahap (*shifting loyalty*) dari lingkungan sosial asli. Proses ini tidak berlangsung di satu kanal, melainkan menyebar secara terpadu di tiga lapis platform digital—media sosial untuk paparan awal, aplikasi pesan terenkripsi untuk indoktrinasi intensif, dan online gaming sebagai ruang penguatan identitas kelompok. Kedua, sebagai respons atas kerentanan tersebut, penelitian merumuskan model Transformasi Ketahanan Multitingkat. Model ini mengintegrasikan tiga lini pertahanan: (a) ketahanan diri melalui literasi digital kritis dan resiliensi berbasis empati; (b) ketahanan komunitas dengan menempatkan perempuan sebagai agen deteksi dini dan tokoh agama sebagai penyebar narasi moderat di ranah daring; serta (c) ketahanan nasional yang mensyaratkan sinergi lintas kementerian (BNPT, Komdigi, Kemendikdasmen/Kemendiktisaintek) yang didukung anggaran khusus untuk program *re-entry* berbasis trauma bagi mantan simpatisan. Secara implikasi praktis, model ini menyediakan peta jalan konkret bagi perumusan Mekanisme Koordinasi Nasional pencegahan radikalisasi. Namun, sebagai kerangka konseptual, model ini memiliki keterbatasan. Ia belum diuji secara empiris di lapangan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kritik bahwa radikalisasi tidak semata-mata proses kognitif, serta mengabaikan fakta bahwa remaja bertindak sebagai prosumer kreator sekaligus konsumen konten yang memiliki agensi dalam memaknai narasi. Untuk itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan dua arah. Pertama, evaluasi empiris terhadap efektivitas program *peer-to-peer* seperti Duta Damai BNPT, dengan mengukur perubahan kognitif dan perilaku remaja secara terukur. Kedua, studi longitudinal yang menguji korelasi antara tingkat *critical*

thinking dan resistensi terhadap narasi radikal, guna menjadi dasar perancangan kurikulum literasi digital kritis yang adaptif terhadap dinamika platform dan psikologi perkembangan remaja.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, atas bimbingan, arahan, serta berbagai masukan yang bernilai selama proses penyusunan, penyempurnaan, dan penelaahan naskah penelitian ini.

Referensi

- AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry). (2025). *Online radicalization* (Facts for Families No. 143). https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FF-F-Guide/Online_Radicalization-143.aspx
- Adawiah, R. A. (2021). Deradikalisasi anak dari pelaku aksi terorisme. *Sosio Informa*, 7(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2714>
- ANTARA News. (2025, 31 Juli). *BNPT tingkatkan kesiapan kalurahan di Sleman deteksi dini terorisme dan radikalisme*. <https://jogja.antaranews.com/berita/758357/bnpt-tingkatkan-kesiapan-kalurahan-di-sleman-deteksi-dini-terorisme-dan-radikalisme>
- Bronsard, G., Cherney, A., & Vermeulen, F. (2022). Editorial: Radicalization among adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 917557. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.917557>
- Cahyani, H. D., Hadiyanti, A. H. D., & Saptoru, A. (2021). Peningkatan sikap kedisiplinan dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 919–927. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/472>
- Crone, M. (2016). Radicalization revisited: Violence, politics and the skills of the body. *International Affairs*, 92(3), 587–604. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12604>
- Dewi, Z. R., & Sunarni. (2024). Peran literasi digital dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi dan transformasi di era digital. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v4i1.2916>
- Dwiningrum, S. I. A., Rukiyati, & Setyaningrum, A. (2023). Embracing digital literacy through school resilience. *Jurnal Kependidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jk.v7i1.54642>
- Ellis, H., Erez, E., Horgan, J., LaFree, G., & Spaaij, R. (2024, March 25). Comparing violent extremism and terrorism to other forms of targeted violence. *NIJ Journal*.

- <https://nij.ojp.gov/topics/articles/comparing-violent-extremism-and-terrorism-other-forms-targeted-violence>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton.
- Faridah, F., K, S., Mansur, A. Y., & Al Anshori, M. Z. (2025). Resiliensi: Menjaga ketahanan mental dalam menghadapi tantangan hidup. *MIMBAR: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 11(1). <https://doi.org/10.47435/mimbar.v11i01.3636>
- GCERF (Global Community Engagement and Resilience Fund). (2024). *GCERF investment strategy for Indonesia 2024–2028*. <https://www.gcerf.org/wp-content/uploads/2015/12/Indonesia-Strategy-for-investment-2024-28.pdf>
- Gross, Y., Carducci, B., Nave, C., Mio, J., & Riggio, R. (2020). Erikson's stages of psychosocial development. Dalam *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (hlm. 179–184). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118970843.ch31>
- Hamidah, N. A., & Nuqul, F. L. (2020). Peran kecenderungan berpikir tertutup dan kecenderungan kebersetujuan pada potensi perilaku radikal mahasiswa. *Psikologika*, 25(2), 307–320. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol25.iss2.art10>
- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1–23. <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/26/1/RP-73-003.pdf>
- Huda, A. Z., Runturambi, A. J. S., & Syauqillah, M. (2021). Social media as an incubator of youth terrorism in Indonesia: Hybrid threat and warfare. *Jurnal Indo-Islamika*, 11(1), 21–40. <https://doi.org/10.15408/jii.v11i1.20362>
- INFID. (2023). *Laporan pemetaan program pencegahan ekstremisme-kekerasan*. INFID. https://infid.org/wp-content/uploads/2024/03/Buku-Laporan-Penelitian-Capaian-dan-Keberlanjutan-RAN-PE_INFIDxIRE_2023_Published.pdf
- Ismail, N. H. (2025). *Protecting minors from online radicalisation in Indonesia* (RSIS Commentary No. CO25181). S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2025/08/CO25181.pdf>
- Kalista, D. (2025). Analisis mekanisme persuasi dan rekrutmen online kelompok radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum dan Sosial UMSU*, 3(1). <https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jmhs/article/view/91>
- Kemdiktisaintek. (2025). *Kemdiktisaintek dan BNPT perkuat sinergi cegah ekstremisme berbasis kekerasan di perguruan tinggi*. <https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/kemdiktisaintek-dan-bnpt-perkuat-sinergi-cegah-ekstremisme-berbasis-kekerasan-di-perguruan-tinggi/>
- Kemenag. (2022). *Pelopor penguatan MB Kemenag diingatkan tantangan hoaks dunia digital*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/daerah/pelopor-penguatan-mb-kemenag-diingatkan-tantangan-hoaks-dunia-digital-w79wo9>

- Kementerian PANRB. (2022, 29 Desember). *BNPT: Indeks risiko terorisme dan potensi radikalisme di 2022 turun*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>
- Kewuel, H. (2019). *Pluralisme, multikulturalisme, dan batas-batas toleransi*. Program Studi Antropologi FIB Universitas Brawijaya. https://antropologi-fib.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Seri-Studi-Kebudayaan-1_Pluralisme-Multikulturalisme-dan-Batas-batas-Toleransi-2017-Copy.pdf
- Komdigi. (2019). *[Disinformasi] Agama itu racun, lebih baik pendidikan agama di Indonesia dihapus saja*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-agama-itu-racun-lebih-baik-pendidikan-agama-di-indonesia-dihapus-saja>
- Kurniawati, N. (2023). Pemberdayaan perempuan sebagai solusi pencegahan radikalisme. *Jurnal Ilmu Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/jm.2023.31.02>
- Lewoleba, K. (2023). Kajian faktor penyebab dan upaya pencegahan radikalisme di kalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 171–180. <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2653>
- Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020). Bahaya radikalisme terhadap moralitas remaja melalui teknologi informasi (media sosial). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 21–34. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v20i1.2360>
- Marnani, C. S., Murtiana, S., Supriyadi, A. A., & Nur Wahyu, P. (2024). Peran perempuan melalui organisasi PKK sebagai upaya menghadapi ancaman ideologi radikalisme dan terorisme. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 261–276. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.567>
- Muhasim, M., & Zulfikar, M. (2024). The role of religious figures in community resilience in disaster-prone areas. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 248–262. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i2.248-262>
- Munabiah, L. (2023). Penanganan hoaks keagamaan di sosial media melalui literasi digital milenial. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 4(1). <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v4i1.6764>
- Musyafak, N., Marfu'ah, U., Khasanah, N. L., Putri, F. A., & Avivah, D. (2020). Peran perempuan dalam pencegahan radikalisme. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1). <https://doi.org/10.14421/JD.2112020.6>
- Prastiyo, W. E., & Setiabudhi, I. K. R. (2021). Children involvement in terrorism activities: Perpetrator or victim? (A study on the circle of violence). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a3>
- Putri, A. (2024). Pengembangan resiliensi pemuda Indonesia melalui analisis multilevel. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1). <https://doi.org/10.33627/gw.v7i1.1693>

- Ramadhani, A., & Nur, H. (2025). Peran resiliensi dalam pengembangan diri remaja: Studi literatur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(9), 122–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15303271>
- Rany, R. M., Lusiana, E., & Perdana, F. (2025). Digital literacy and critical thinking in adolescents: A literature review. *Jurnal Basicedu*, 9(5). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10732>
- Ridlwani, M. K., & Fitriana, E. (2024). Building resilient Muslim families: An analysis of resilience based on the Qur'an and Hadith. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 11(2), 387–400. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13620>
- Rongiyati, S. (2021). *The urgency of synergistic regulation of personal data protection and national cyber security* (Info Singkat Vol. XIII, No. 11/I/Puslit/Juni/2021). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-11-I-P3DI-Juni-2021-195-EN.pdf
- Sahal, A. M., & Bayuseto, A. (2022). Menakar sejarah gerakan radikalisme Islam serta upaya pemerintah dalam mengatasinya. *Focus*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.26593/focus.v2i2.5406>
- Saputro, J. D. (2025). Jack Mezirow's transformative learning on the dimension of critical thinking and digital literacy: A needs analysis study. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(1), 158–175. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i1.92388>
- Scheuble, S., & Oezmen, F. (2022). *Extremists' targeting of young women on social media and lessons for P/CVE*. European Commission, DG Home Affairs. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/ad_hoc_young_women_social_media_Lessons-p-cve_022022_en.pdf
- Sholeh, B., Hutagalung, S., & Alting, H. (2018). *Ekonomi kaum muda dan kebijakan kontraterorisme*. Pustaka Pelajar.
- SIMLITBANG Kemenag RI. (2022). *GPR together, GPR stronger: Dari humas pemerintah Indonesia kita pulih bersama*. Kementerian Agama RI. https://simlitbang.balitbangdiklat.net/assets_front/pdf/1668573038Together.pdf
- Siregar, B., & Ependi, R. (2021). Upaya pemerintah menangkal gerakan radikalisme. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(2). <https://doi.org/10.54248/alhadi.v6i2.3873>
- Sugihartati, R., Suyanto, B., & Sirry, M. (2020). The shift from consumers to prosumers: Susceptibility of young adults to radicalization. *Social Sciences*, 9(4), Article 40. <https://doi.org/10.3390/socsci9040040>
- Sunarti, E., & Damayanti, R. (2025). Edukasi resiliensi remaja pada model pengembangan Kampung Ramah Keluarga. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(1), 187–197. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.1.187-197>

- Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan pemahaman radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 77-84. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/979/1/Jurnal%20JIAPD%20Radikalisme.pdf>
- UNOCT (United Nations Office of Counter-Terrorism) & UNICRI. (2021). *Countering terrorism online with artificial intelligence: An overview for law enforcement and counter-terrorism agencies in South Asia and South-East Asia*. <https://unicri.org/Publications/Countering-Terrorism-Online-with-Artificial-Intelligence-%20SouthAsia-South-EastAsia>
- Wahid Foundation. (2025). *Menyusun kontra-narasi dan narasi alternatif untuk toleransi dan perdamaian*. Wahid Foundation. ISBN 978-602-7891-16-6.
- Wahyuni, R., Rahma, H. L., Putri, & Hermawan. (2022). Pemahaman radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2115>